



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

# **DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik

**BBKKP 2020**



Daftar Informasi Publik  
**Balai Besar Kulit, Karet Dan Plastik**  
Tahun 2020



## DAFTAR INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK TAHUN 2020

### I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	Jenis Informasi	Detail Informasi	Format Informasi Media			Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan	Waktu dan Tempat Pembuatan	Jangka Waktu Penyimpanan
			Hard copy	Soft copy	Online				
<b>PROFIL</b>									
1.	Sejarah BBKPP	Sejarah BBKPP	✓	✓	✓	Kabid Pengembangan Jasa Teknik	Kasi Pemasaran	Yogyakarta 2019	Selama Berlaku
2.	Profil BBKPP	Tusi,Visi,Misi, Jenis Layanan	✓	✓	✓	Kabid Pengembangan Jasa Teknik	Kasi Pemasaran	Yogyakarta 2020	Selama Berlaku
3.	Rencana Strategis	Rencana Strategis 2020-2025	✓	✓	✓	Kabag. Tata Usaha	Kabag. Tata Usaha	Yogyakarta 2020	Selama Berlaku
4.	Struktur Organisasi	Struktur organisasi BBKPP	✓	✓	✓	Kabag. Tata Usaha	Kasubag Kepegawaian	Yogyakarta 2020	Selama Berlaku
5.	Profil Pejabat	Profil singkat pejabat struktural	-	-	✓	Kabag. Tata Usaha	Kasubag Kepegawaian	Yogyakarta 2020	Sampai dengan diperbarui
6.	Daftar Alamat	Daftar Pejabat disertai dengan alamat	✓	✓	-	Kabag. Tata Usaha	Kasubag Kepegawaian	Yogyakarta 2019	Sampai dengan diperbarui
7.	Laporan Harta Kekayaan Pejabat	Laporan LHKP Kepala BBKPP yang telah diperiksa dan diverifikasi	-	✓	✓	Kabag. Tata Usaha	Kasubag Kepegawaian	Yogyakarta 2018	1 tahun

PROGRAM/KEGIATAN									
1.	DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran :Program dan Kegiatan	✓	✓	✓	Kabag. Tata Usaha	Kasubag Program dan Pelaporan	Yogyakarta 2019, 2020	5 tahun
KINERJA									
1.	LAKIP	Realisasi anggaran, pencapaian sasaran, kendala kegiatan	✓	✓	✓	Kabag. Tata Usaha	Kasubag Program dan Pelaporan	Yogyakarta 2018, 2019	3 tahun
2.	TAPKIN	Rencana dan Penetapan Kinerja	✓	✓	✓	Kabag. Tata Usaha	Kasubag Program dan Pelaporan	Yogyakarta 2019, 2020	7 tahun
3.	Laporan Akuntabilitas Kinerja ( PP 39 )	Laporan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	✓	✓	✓	Kabag. Tata Usaha	Kasubag Program dan Pelaporan	Yogyakarta 2019, 2020	3 tahun
4.	RKA-KL	Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga	✓	✓	✓	Kabag. Tata Usaha	Kasubag Program dan Pelaporan	Yogyakarta 2019, 2020	4 tahun
5.	Laporan Survei Kepuasan	Hasil penilaian pihak berkepentingan (pengguna jasa) atas kinerja pelayanan publik	✓	-	✓	Kabid PJT	Kasie Pemasaran	Yogyakarta 2018, 2019	1 tahun

LAPORAN KEUANGAN									
1.	Laporan Keuangan	Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan	✓	✓	✓	Kabag. Tata Usaha	Kasubag Keuangan	Yogyakarta 2018, 2019	10 tahun
2.	Laporan BMN	Laporan inventaris Barang Milik Negara	✓	✓	✓	Kabag. Tata Usaha	Kasubag Keuangan		1 tahun
AKSES INFORMASI PUBLIK									
1.	Tata Cara Permohonan Informasi Publik	Tata Cara Permohonan Informasi Publik	✓	✓	✓	Kabid. Pengembangan Jasa Teknik	Kasie Informasi	Yogyakarta 2020	5 Tahun
2.	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Laporan pelayanan informasi publik berupa jumlah permohonan, waktu penyelesaian, jumlah informasi yang diberikan dan ditolak, serta sarana prasarana dalam menunjang layanan informasi	✓	✓	✓	Kabid. Pengembangan Jasa Teknik	Kasie Pemasaran	Yogyakarta 2018, 2019	5 tahun
PENGUMUMAN									
1.	Pengumuman Pengadaan Barang/jasa	Pengumuman Pengadaan Barang/jasa	-	-	✓	Kabag. Tata Usaha	Kasubag Umum	Yogyakarta 2020	3 tahun

## II. INFORMASI YANG WAJIB DI UMUMKAN SERTA MERTA

NO	Jenis Informasi	Detail Informasi	Format Informasi Media			Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan	Waktu dan Tempat Pembuatan	Jangka Waktu Penyimpanan
			Hard copy	Soft copy	Online				
1.	Larangan Merokok	Larangan Merokok, Area Kantor Bebas Rokok	✓	-	✓	Kabag. Tata Usaha	Kasubag Umum	Yogyakarta 2019	3 Tahun
2.	Himbauan Menjaga Kebersihan	Himbauan untuk Menjaga Kebersihan	✓	-	✓	Kabag. Tata Usaha	Kasubag Umum	Yogyakarta 2019	3 Tahun
3.	Informasi kesiagaan dan tanggap darurat	Informasi tentang prosedur kesiagaan dan tanggap darurat, jalur evakuasi, titik kumpul	✓	✓	-	Kabag. Tata Usaha	Kasubag Umum	Yogyakarta 2019	5 tahun
4.	Kegiatan Seminar/ Diseminasi/ Workshop di BBKPP	Kegiatan Seminar/Workshop di BBKPP	✓	✓	✓	Kabid. Pengembangan Jasa Teknik	Kasie Informasi	Yogyakarta 2019	5 Tahun

## III. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	Jenis Informasi	Detail Informasi	Format Informasi Media			Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan	Waktu dan Tempat Pembuatan	Jangka Waktu Penyimpanan
			Hard copy	Soft copy	Online				
<b>KEPUTUSAN</b>									
1.	Keputusan Kepala BBKPP	Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi	✓	✓	✓	Kabag. Tata Usaha	Kasubag Kepegawaian	Yogyakarta 2018, 2019	3 tahun
2.	Surat Keputusan/ Keputusan yang diterbitkan oleh BBKPP	SK yang diterbitkan oleh BBKPP (Susunan Personalia; Penunjukan Panbel & Panrim; Penunjukan dan Pengangkatan tenaga ahli/narasumber/ kegiatan;dll)	✓	-	-	Kabag. Tata Usaha	Kasubag Kepagawaian	Yogyakarta 2018, 2019	3 tahun

INFORMASI TENTANG ORGANISASI									
1.	Standar Layanan Informasi Publik	Hak dan kewajiban permohonan, cara memperoleh informasi, prosedur dan mekanisme informasi	✓	✓	✓	Kabid. Pengembangan Jasa Teknik	Kasie Informasi	Yogyakarta 2020	5 tahun
2.	SOP BBKPP	Sistem Operasional Prosedur Balai Besar Kulit Karet dan Plastik	✓	✓	✓	Wakil Manajemen	Sekretariat ISO	Yogyakarta 2019	3 tahun
PUBLIKASI									
1.	Majalah Kulit, Karet dan Plastik	Majalah Kulit, Karet dan Plastik	✓	✓	✓	Kabid. SARS	Kasie Sarana Riset Karet dan Plastik	Yogyakarta 2013	5 tahun
2.	Guntingan Pers	Kliping Koran terkait industri kulit, karet dan plastik	✓	-	✓	Kabid. Pengembangan Jasa Teknik	Kasie Informasi	Yogyakarta 2013	5 tahun
3.	Tarif Jasa Layanan Teknis BBKPP	Tarif Jasa Layanan Teknis BBKPP Sesuai Dengan PP 47 tahun 2011	✓	✓	✓	Kabid. Pengembangan Jasa Teknik	Kasie Pemasaran	Yogyakarta, 2011	Sampai Dengan Tidak Berlaku
HASIL LITBANG									
1.	Daftar Hasil Litbang BBKPP	Daftar Hasil Litbang BBKPP	✓	✓	✓	Kabid. Pengembangan Jasa Teknik	Kasie Informasi	Yogyakarta 2019	5 tahun

#### IV. DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Data pribadi pegawai a. Kondisi keuangan pegawai, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai; b. Hasil evaluasi terkait dengan kapabilitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan pegawai; c. Riwayat, kondisi & perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis pegawai dan anggota keluarga d. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat dibuka apabila : a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan; b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
2.	Dokumen Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU. No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 butir 1  Perpres No.70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; pasal 66	Mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.  Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran.	Tahun berjalan (hingga berakhirnya kegiatan lelang)	



3.	Dokumen Penawaran Lelang	UU. No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 butir 2	Informasi hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat	Tahun berjalan (hingga berakhirnya kegiatan lelang)	
4.	Laporan keuangan yang belum diaudit	UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 30 ayat (1)	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan karena data dan informasinya masih berubah.	Informasi menjadi terbuka setelah pengesahan dari auditor/lembaga keuangan.	
5.	Dokumen perusahaan yang menjadi pelanggan Unit Pelaksana Teknis	UU No 30 Tahun 2000 tentang rahasia Dagang Pasal 3 butir 2	Informasi hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.	Selama menjadi pelanggan UPT	Informasi bisa diperoleh apabila mendapat izin dari perusahaan yang bersangkutan
6.	Informasi tentang profil perusahaan/calon investor yang mengusulkan dan memanfaatkan fasilitas tax holiday, bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP)	UU No 30 Tahun 2000 tentang rahasia Dagang Pasal 3 butir 2	Informasi hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.	Setelah perusahaan mendapat persetujuan	
7.	Data analisa, hasil uji/kalibrasi dan sertifikat kalibrasi, baik dari perorangan maupun dari perusahaan (badan)	UU No 30 Tahun 2000 tentang rahasia Dagang Pasal 3 butir 2	Mencegah kemungkinan persaingan tidak sehat	Permanen	

8	Hasil penelitian yang masih dalam proses perolehan HKI	UU No 14 Tahun 2001 tentang paten Pasal 3 ayat 1	Apabila informasi disampaikan kepada masyarakat sebelum diperoleh tanggal penerimaan permohonan paten ( <i>filing date</i> ) maka pengajuan paten dapat ditolak karena tidak baru.	Sejak inventor memperoleh invensinya sampai diajukan permohonannya sehingga diperoleh tanggal penerimaan permohonan paten.	Menjaga kerahasiaan karena asas konstitutif dan <i>first to file</i> serta asas kebaruan
9.	Hasil penelitian yang dibiayai oleh pihak ketiga/pemesan	UU No 30 Tahun 2000 tentang rahasia Dagang Pasal 3 butir 3	Sifat kerahasiaan informasi dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial/dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi	Permanen	Harus mendapat izin atau persetujuan dari perusahaan pemilik dokumen.
10.	Dokumen milik Lembaga Sertifikasi (LSSM, LSPro dan LSSML) terkait hasil audit pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, sampling, dll dalam proses sertifikasi.	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf b	Apabila informasi dibuka kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Permanen	Harus mendapat izin atau persetujuan dari pemilik dokumen.

11.	Dokumen perusahaan yang mengusulkan dan masuk dalam daftar Objek Vital Nasional Industri (OVNI)	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf b	Apabila informasi dibuka kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Permanen	Informasi dapat dibuka oleh aparat penegak hukum bila terkait perkara pidana di pengadilan.
12	Draft/proses/Data penanganan kasus industri, baik berupa kasus antidumping, subsidi dan safeguard	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf i	Data dan informasi masih belum final sewaktu-waktu dapat berubah sehingga perlu dirahasiakan ,	Hingga laporan final diterbitkan	
13	Draft dokumen MOU kerjasama Industri dalam dan luar negeri	UU No 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf i	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorandum atau surat-surat antar badan publik/intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan</li> <li>• Berpotensi mengganggu hubungan luar negeri.</li> </ul>	Setelah perjanjian berakhir	

## Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik

Jl. Sokonandi No. 9 Yogyakarta



[www.bbkkp.kemenperin.go.id](http://www.bbkkp.kemenperin.go.id)



[bbkkp\\_jogja@yahoo.com](mailto:bbkkp_jogja@yahoo.com)



08112827821



[Bbkkp Kemenperin](https://www.facebook.com/BbkkpKemenperin)



[bbkkp.kemenperin](https://www.instagram.com/bbkkp.kemenperin)



[BbkkpKemenperin](https://twitter.com/BbkkpKemenperin)



[bbkkp.kemenperin](https://line.me/tv/bbkkp.kemenperin)



[bbkkpKemenperin](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[t.me/bbkkp\\_kemenperin](https://t.me/bbkkp_kemenperin)  
(channel) +62-811-2827-821